

**ANALISIS RASIO KEUANGAN SEBAGAI ALAT UNTUK
MENGETAHUI KINERJA KEUANGAN KOPERASI PADA
KOPERASI UNIT DESA "SIDOHARJO" WONOGIRI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

FRIDA ARDIAN SEPTIANA

B100 050 359

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak pembangunan lima tahun pertama pemerintah telah melakukan berbagai usaha yang bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat yang rendah, karena masalah pokok negara berkembang adalah kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Sarana utama pemerintah adalah pembangunan ekonomi, politik, dan keamanan. Keterkaitan proses pembangunan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 harus tetap dipertahankan supaya pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sekaligus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pengertian koperasi dalam undang-undang koperasi tahun 1992 no 25 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian koperasi menurut undang-undang tahun 1992 no 25 tersebut secara umum dapat dijelaskan bahwa koperasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerjasama berasama-sama atau bergotong royong berdasarkan persamaan hak dan kewajiban untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi.

Koperasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Koperasi merupakan kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal.

2. Koperasi bekerja sama, bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban.
3. Segala kegiatan koperasi dilaksanakan atas kesadaran para anggota, tidak boleh dilakukan dengan paksaan, atau ancaman dan campur tangan dari pihak-pihak lain yang tidak berhubungan atau ada sangkut pautnya dengan soal-soal intren koperasi.
4. Tujuan koperasi benar-benar merupakan kepentingan para anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan kerja dan jasa yang disumbangkan anggota masing-masing.

Menurut arti koperasi sebagaimana tersebut di atas, maka koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dan orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama yang pada akhirnya mengangkat, mempertahankan diri dan membebaskan dari kesulitan.

Dilihat dari undang-undang koperasi no 25 tahun 1992 pasal 3, tujuan koperasi adalah suatu organisasi untuk memajukan kesejahteraan anggota pada umumnya, serta ikut membangun tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Menurut UUD 1945 tujuan dari koperasi dapat disimpulkan menjadi tiga bagian yang akan diuraikan di bawah ini:

- 1) Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan anggotanya:
 - a. Anggota koperasi mendirikan koperasi karena adanya suatu dorongan untuk menyatukan kepentingan, yaitu menyatukan usahanya agar memperoleh manfaat yang lebih baik lagi.
 - b. Berdirinya koperasi para anggota bermaksud meningkatkan taraf hidupnya.
- 2) Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan masyarakat:
 - a. Koperasi dapat menyatukan warga masyarakat yang sangat lemah baik itu kedudukan ekonominya guna membantu para anggotanya untuk meningkatkan penghasilnya sehingga kemakmuran masyarakat dapat mengatasi pengangguran.
 - b. Koperasi juga dapat meningkatkan dan memperluas usahanya, akan dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga mengatasi pengangguran.
 - c. Koperasi dapat membantu usaha-usaha sosial di dalam masyarakat.
- 3) Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan tata perekonomian nasional:
 - a. Meningkatkan produksi di segala bidang usahanya.
 - b. Perluasan pada lapangan kerja.
 - c. Pembagian pendapatan negara kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Koperasi menjadi suatu panutan atau contoh bagi pemerintah untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan perekonomian nasional. Koperasi

sebagai lambang ekonomi rakyat yang berwatak sosial merupakan suatu reaksi yang termuat dan terkandung di dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan tujuan koperasi adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya.

Adapun fungsi koperasi sebagai berikut:

1. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia.
2. Sebagai upaya mendemokrasi sosial ekonomi Indonesia.
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia.
4. Memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi.

Sedangkan peran dan tugas-koperasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia.
2. Mengembangkan demokrasi di Indonesia.
3. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada.

Koperasi sebagai badan usaha yang makin mandiri dan andal harus mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Peran aktif masyarakat dalam menumbuhkan pengembangan koperasi terus ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran, kegairahan, dan kemampuan berkoperasi disuluruh lapisan masyarakat melalui upaya penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan.

Menjelang era globalisasi yang ditandai persaingan bisnis yang kian tajam koperasi harus berbenah diri. Bukan hanya bersaing dengan badan swasta maupun badan usaha milik negara, namun juga dengan sesama koperasi. Koperasi harus mampu mengadakan kontak ekonomi secara internasional. Hanya dengan cara ini kesejahteraan anggota koperasi bisa ditingkatkan lebih cepat. Undang-Undang koperasi no. 25 tahun 1992 mengacu pada persiapan lembaga koperasi untuk menjadi semakin profesional dari segi pengelolaan bisnis dan mandiri di sektor pengorganisasian. Pemerintah agaknya menginginkan adanya pembaharuan dengan pengurangan perannya dalam lembaga koperasi, sehingga koperasi akan lebih otonom, independen, mandiri, dan profesional sebagai lembaga usaha. Pemerintah di satu sisi bisa saja mengatakan agar koperasi menangani sektor-sektor yang dipercayakan pemerintah kepadanya. Misalnya Koperasi Unit Desa (KUD) yang ditugasi untuk ikut melaksanakan pemungutan iuran televisi dan menjadi rantai tata niaga cengkeh, padi, dan sebagainya. Disamping tugas politisnya yang lain, seperti dalam program pengadaan stok pangan, penyaluran sarana produksi pertanian dan lain-lain. Namun koperasi juga bisa menolak jika dari segi manajerial ternyata tidak menguntungkan, karena kerugian koperasi pada akhirnya akan dirasakan anggotanya.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan makin banyaknya koperasi-koperasi yang menjadi besar, maka faktor produksi modal mempunyai arti yang lebih penting lagi. Menurut pasal 41 Undang-Undang no. 25 tahun 1992 modal koperasi terdiri dari simpanan-simpanan, pinjaman-

pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. Simpanan anggota terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan sukarela berasal dari bukan anggota, cadangan koperasi dipupuk melalui penyisihan sisa hasil usaha dan cara-cara lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Cadangan dalam koperasi dimaksudkan untuk memupuk modal koperasi sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi dan tidak boleh dibagikan kepada anggota yang keluar. Permodalan dalam koperasi tidak hanya mencakup modal yang disetor oleh anggota, permodalan dalam koperasi meliputi seluruh pembelanjaan koperasi yang dapat bersifat permanen atau sementara. Seperti yang kita ketahui bahwa koperasi adalah salah satu badan usaha yang diakui sebagai badan hukum yang melakukan kegiatannya dalam usaha jasa dan dagang. Jadi sudah sewajarnya jika koperasi tujuannya juga mencari keuntungan disamping mempunyai fungsi sosial. Laba yang diperoleh koperasi itu berupa Sisa Hasil Usaha (SHU).

Jumlah laba yang diperoleh selama satu periode akuntansi dapat diketahui dengan melihat laporan laba rugi serta untuk mengetahui jumlah modal dari suatu koperasi dapat melalui neraca atau laporan perubahan modal. Dasar untuk dapat menginterpretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu koperasi adalah mengadakan analisa hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah-jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat analisa berupa ratio, ini akan dapat menjelaskan

atau memberi gambaran tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu koperasi terutama apabila angka ratio tersebut dibandingkan dengan angka ratio pembanding yang digunakan sebagai standart. Tujuan analisis ratio umumnya adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari koperasi yang bersangkutan.

Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu koperasi untuk dapat memenuhi kebijakan finansialnya yang segera harus dipenuhi. Suatu koperasi yang mampu memenuhi kewajibannya pada saat ditagih disebut koperasi yang likuid. Sedangkan koperasi yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya saat ditagih disebut koperasi yang illikwid. Apabila koperasi dalam keadaan likuid berarti koperasi tersebut mempunyai alat pembayaran atau aktiva lancar lebih besar dari pada hutang lancarnya. Sebaliknya koperasi yang illikuid berarti koperasi tersebut aktiva lancarnya lebih besar dari pada hutang lancarnya. Likuiditas dapat dikatakan sebagai perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar pada suatu neraca.

Solvabilitas adalah kemampuan suatu koperasi untuk membayar semua hutang-hutangnya. Suatu koperasi yang solvabel berarti koperasi tersebut mempunyai aktiva/kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya tetapi tidak dengan sendirinya berarti koperasi tersebut likuid. Sebaliknya koperasi yang insolvel tidak dengan sendirinya bahwa koperasi tersebut juga likuid.

Rentabilitas adalah kemampuan suatu koperasi untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya dengan modal yang kecil menyebabkan koperasi dalam keadaan rendabel artinya modal yang digunakan untuk mendapatkan laba tersebut sangat efisien. Cara untuk menilai rentabilitas ini ada bermacam-macam antara lain rentabilitas ekonomis dan rentabilitas modal sendiri.

Sesuai dengan jatidirinya, koperasi sebagai badan usaha harus memenuhi kepentingan ekonomi anggotanya, sehingga koperasi mampu berperan sebagai sentra media bagi para anggotanya dan meningkatkan kesejahteraannya, terutama dikaitkan dengan otonomi daerah, koperasi harus responsive dan aktif dalam menghadapi tantangan yang dapat diubah menjadi suatu peluang.

Sebagai perwujudan dari kepedulian terhadap perkembangan dan pembinaan koperasi, pemerintah melalui eks Badan Pengembangan Sumberdaya Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (BPS-KPKM) telah melakukan langkah pembinaan manajemen, pembiayaan, dan pendistribusian informasi pasar kepada koperasi yang dikumpulkan dalam suatu strata atau area tertentu. Aktivitas ini disebut dengan langkah nyata, yang saat ini diupayakan oleh pemerintah adalah pengembangan yang potensial dalam meningkatkan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor. Langkah ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain lebih fokusnya kebijakan yang diambil, lebih terarahnya diskusi informasi, serta tingkat kompetisi dan eksistensi yang tinggi dari pelaku usaha yang berada dalam sentra/klaster tersebut.

Penyediaan sumberdaya permodalan yang memadai, tepat waktu serta jumlah sesuai dengan kebutuhan, merupakan salah satu faktor yang menentukan iklim sehat bagi pengembangan koperasi. Hal ini mengingat 47,5 persen industri kecil dan 3,40 persen industri kerajinan rumah tangga mengalami kesulitan modal usaha, di mana angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan kesulitan mendapatkan bahan baku, pemasaran, maupun keterampilan tenaga kerja. Karena itu, fasilitas investasi/permodalan merupakan prioritas utama bagi pemerintah untuk dikedepankan bagi pengembangan koperasi, merupakan salah satu paket kebijakan yang berupa dukungan finansial bagi pengembangan koperasi di samping dukungan nonfinansial dalam bentuk penyediaan jasa oleh Layanan Pengembangan Bisnis (LPB), serta dukungan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan koperasi dan kesejahteraan anggotanya.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kebijakan pemerintah berupa penyaluran kredit dengan pendekatan koperasi, terutama dalam meningkatkan peran, perlu dilakukan suatu perhitungan yang dapat mengukur tingkat produktivitas investasi yang dilakukan oleh koperasi. Dengan demikian, perbandingan antara investasi yang disalurkan dengan output yang dihasilkan dapat diketahui. Jadi, apabila tingkat output tertentu harus dicapai oleh koperasi, maka pemerintah dapat mengetahui besaran jumlah kredit yang perlu disalurkan. Dengan penyusunan besaran investasi, maka dapat teridentifikasi koperasi yang tergolong dalam kelompok labor intensive atau capital intensive.

Program evaluasi kinerja koperasi yang dilakukan secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan perlu dikembangkan melalui kegiatan pemantauan dari waktu ke waktu. Untuk itu, perlu dilaksanakan suatu kegiatan survai khusus koperasi yang ditujukan untuk memantau tingkat kerjanya, baik yang berkaitan dengan aspek mikro yang berhubungan dengan manajemen koperasi secara individual, maupun aspek mikro yang menyangkut peran kelembagaan dalam perekonomian nasional.

Program tersebut akan ditempuh melalui dua pendekatan. Pertama, pengukuran kinerja koperasi terpilih dengan mengamati serta memantau perkembangan beberapa indikator mikro selama tahun 2001 dan 2002. Indikator mikro yang dimaksud adalah rasio-rasio finansial yang meliputi: rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, serta koperasi sebagai pihak yang menyalurkan kredit dana kepada anggota. Melalui hasil pengukuran rasio-rasio finansial tersebut dapat dilakukan analisis tentang kinerja koperasi dalam mengembangkan usahanya selama 2 periode akuntansi, 2001 dan 2002. Kedua, melalui pendekatan makro akan diukur tingkat kemampuan koperasi dalam menciptakan nilai tambah, atau dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB) selama tahun 2001 dan 2002. Besarnya PDB yang dihasilkan oleh koperasi akan memperlihatkan peran dan sumbangan unit usaha tersebut dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi lokal.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kekuatan finansial koperasi. Selain itu, hasil yang diperoleh diharapkan dapat digunakan

oleh pemerintah, sebagai acuan untuk rekomendasi program pembinaan koperasi. Tujuan dari kajian ini adalah:

- a. Mendapatkan informasi tentang perkembangan koperasi penerima dana dari segi perkembangan usaha, modal sendiri/modal disetor, aset, pinjaman yang diberikan, pinjaman yang diterima, simpanan anggota, jumlah peminjam, jumlah penyimpan dan kualitas pinjaman, serta mutu pelayanan.
- b. Mendapatkan informasi tentang kemampuan koperasi dan penyediaan modal (investasi) sendiri.
- c. Memperoleh informasi tentang perkembangan kinerja koperasi penerima dana dari keluaran (produk baru, usaha baru, volume usaha, nilai tambah, tenaga kerja, kapasitas produksi, dan sebagainya).
- d. Memperoleh informasi tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan peran koperasi melalui program bantuan dana.

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil kajian ini adalah model pengukuran perkembangan koperasi dalam rangka mendukung otonomi daerah. Selain itu, dapat juga digunakan untuk mendukung otonomi daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan atau rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan, baik oleh pihak terkait di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Kajian ini dilakukan menggunakan purposive sampling. Data yang dikumpulkan secara sekunder dan primer ditabulasi, diolah dan diambil sesuai dengan dua pendekatan, yaitu secara makro. dan mikro. Adapun kinerja

koperasi diukur dengan melihat rasio likuiditas, profitabilitas, solabilitas dan rentabilitas. Di samping itu diukur juga nilai tambahnya.

Hasil kajian menunjukkan:

- 1) Program pemerintah tentang perkuatan permodalan melalui bantuan dana yang dikucurkan kepada koperasi berjalan lancar dan baik.
- 2) Penambahan dana bagi koperasi sangat membantu dan pengaruhnya sangat positif untuk meningkatkan usaha, volume usaha (omzet), penyerapan tenaga kerja, penciptaan nilai tambah, meningkatkan produk, dan investasi.
- 3) Secara umum dampak dari penambahan dana kepada koperasi belum memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap usaha yang telah dijalankan sebelumnya, karena keterbatasan dana yang disalurkan. Pada umumnya, koperasi penerima dana belum dapat memenuhi kebutuhan dana bagi keseluruhan anggotanya.
- 4) Pinjaman dana ini umumnya dapat tersalurkan ke anggota, kendati demikian masih ada beberapa pengakuan koperasi yang tidak cocok dengan pengakuan anggota penerima dana mengenai besaran nilai rupiah yang dipinjamkan.
- 5) Harapan dari koperasi agar kiranya pemerintah dapat memberikan dana pendamping yang lebih intensif dan tenaga pendamping yang telah berpengalaman. Dengan adanya bentuk pembinaan yang berkesinambungan, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi, diharapkan adanya perhatian dari pemerintah untuk melihat usaha secara nyata.

Demikian pula pada bimbingan, pemerintah dapat menyediakan semacam peralatan yang digunakan, di samping dana seperti yang sedang berjalan.

Secara garis besar untuk mengoptimalkan primer koperasi direkomendasikan, bahwa pemerintah mau memberikan bantuan dana yang lebih besar dari yang sekarang diterima dengan bunga yang relatif lebih rendah dan disertai dengan pembinaan.

Koperasi Unit Desa (KUD) Sidoharjo Wonogiri sebagai KUD yang cukup besar di Wilayah kabupaten Wonogiri dalam menjalankan usahanya selalu memperoleh keuntungan yang besar. Keuntungan tersebut diperoleh dari kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh KUD Sidoharjo. Kegiatan usaha paling besar menghasilkan laba dari simpan pinjam, dengan suku bunga/ jasa yang diberlakukan sebesar 1,5% untuk cara flat, sedangkan dengan cara saldo menurun sebesar 2,5%. Usaha lain yg dijalankan yaitu penyaluran pupuk, waserda, wartel, pelayanan pembayaran listrik dan masih banyak lagi usaha yang dijalankan oleh KUD Sidoharjo Wonogiri. Meskipun KUD Sidoharjo ini kegiatan usahanya banyak dan cukup maju tetapi sering kali anggota tidak mau peduli dengan keadaan koperasinya, program dari koperasi sering kali mereka tidak peduli sehingga penguruslah yang melaksanakan program itu sendiri tanpa bantuan dan dukungan anggota, jadi anggota KUD Sidoharjo itu pasif. Sebagai koperasi yang cukup besar serta memiliki banyak usaha, setiap tahunnya selalu mendapatkan keuntungan yang cukup besar sehingga modalnya selalu bertambah atau mengalami kenaikan. Tetapi kenaikan modal tersebut belum dapat dikatakan menguntungkan apabila belum dianalisa lebih

lanjut, meskipun kenaikan modal tersebut cukup besar. Untuk menentukan apakah kenaikan modal tersebut menguntungkan atau tidak, maka perlu diadakan analisa terhadap laporan keuangan KUD Sidoharjo. Analisis yang digunakan adalah analisis ratio yaitu suatu teknik untuk menganalisis laporan keuangan dari suatu koperasi/badan usaha yang lain dengan menggunakan ukuran/ratio tertentu, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas dari KUD Sidoharjo. Setelah laporan keuangan KUD Sidoharjo kita analisis lebih lanjut maka dapat diketahui bagaimana keadaan keuangan KUD Sidoharjo. Sehingga menarik minat peneliti untuk mengambil judul penelitian yaitu

ANALISIS RASIO KEUANGAN SEBAGAI ALAT UNTUK MENGETAHUI KINERJA KEUANGAN KOPERASI PADA KOPERASI UNIT DESA "SIDOHARJO" WONOGIRI

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah tersebut sebagai berikut :

1. Banyaknya anggota yang tidak aktif sehingga pengurus yang harus memutuskan setiap permasalahan sendiri.
2. Keadaan keuangan KUD "Sidoharjo" yang belum pernah dianalisis dengan menggunakan analisis ratio maka tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan keadaan keuangan koperasi tidak dapat diketahui, dan juga

tidak diketahui apakah kenaikan modal koperasi tersebut menguntungkan atau tidak.

3. Apabila keadaan keuangan koperasi tidak menguntungkan maka akan diambil kebijakan oleh pengurus.

C. Perumusan Masalah

Bagi suatu koperasi masalah tidak bisa diabaikan begitu saja, akan tetapi perlu diperhatikan dan dipertimbangkan lebih matang dalam pemecahannya. Untuk memecahkan masalah terlebih dahulu harus merumuskan pokok permasalahannya. Perumusan masalah ini sering disebut problematika yang merupakan suatu pernyataan yang perlu dipecahkan dalam penelitian. Sehubungan dengan penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

”Apakah kenaikan modal KUD Sidoharjo Wonogiri menguntungkan apabila ditinjau dari tingkat Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas?

D. Pembatasan Masalah

Melihat luasnya permasalahan yang dihadapi akan sulit tentunya apabila penulis tidak melakukan pembatasan masalah. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kekaburan maksud dan cara pandang serta memudahkan bagi penulis untuk menentukan cara yang tepat dalam pemecahannya.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui apakah kenaikan modal KUD Sidoharjo Wonogiri menguntungkan atau tidak apabila ditinjau dari tingkat Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktek.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Koperasi

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk mengetahui apakah kenaikan modal KUD Sidoharjo Wonogiri menguntungkan atau tidak.

b. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat penulis pergunakan sebagai latihan dalam penerapan ilmu pengetahuan yang penulis terima di bangku perkuliahan, serta pengalaman tentang cara menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan analisis ratio.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang Manajemen Keuangan, Laporan Keuangan, Analisis Laporan Keuangan, Metode dan teknik Analisis Laporan Keuangan, Analisis Rasio.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metode Penelitian, Populasi dan sampel, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang Deskripsi Objek Penelitian, Pengujian Hipotesis, dan Pembahasan Hasil Analisis Data.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang Kesimpulan Hasil Analisis Data, dan Implikasi serta Saran-saran yang dapat diberikan kepada KUD Sidoharjo.